

RINGKASAN

Anis Naufal Musthofa, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/TUN/2022). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H, anggota: Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya, termasuk etika dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi, bahkan hingga pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana terjadi pada kasus Notaris Muhammad Irsan yang menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pemberhentiannya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur dan kriteria pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/TUN/2022, untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/TUN/2022.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan metode yang digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Muhammad Irsan mengandung cacat prosedural, seperti tidak adanya pemeriksaan langsung oleh Majelis Pengawas Pusat, pemanggilan yang hanya dilakukan sekali, dan keterlambatan keputusan Menteri Hukum yang melampaui batas waktu 30 hari, sehingga bertentangan dengan UUJN yaitu melanggar pelanggaran berat terhadap kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan jabatan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Perbedaan pertimbangan hukum hakim terjadi antara PTUN yang menekankan keadilan prosedural dan membatalkan pemberhentian, dengan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali yang mengutamakan keadilan substantif yang melanggar berupa kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya sehingga menilai pelanggaran serius terhadap UUJN sebagai dasar sah pemberhentian demi menjaga integritas jabatan dan melindungi masyarakat.

SUMMARY

Anis Naufal Musthofa, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University. Dishonorable Dismissal of Notaries Who Violate the Notary Law (Study of Supreme Court Decision Number 200 PK/TUN/2022). Advisory Committee, Chair: Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H, member: Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

A notary is a public official authorized to make authentic deeds and plays a crucial role in providing legal certainty for the public. In carrying out their duties, notaries are required to comply with the provisions of the Notary Law (UUJN) and its implementing regulations, including established ethics and procedures. Violations of these provisions can result in sanctions, even dishonorable dismissal, as occurred in the case of Notary Muhammad Irsan, who was highlighted due to alleged procedural violations during his dismissal. The purpose of this study is to analyze the procedures and criteria for dishonorable dismissal of notaries who violate the Notary Law based on Supreme Court Decision Number 200 PK/TUN/2022, and to analyze the differences in the judges' legal considerations in State Administrative Court Decision Number 235/G/2019/PTUN.JKT and Supreme Court Decision Number 200 PK/TUN/2022.

This research uses normative juridical methods, employing regulatory, case-based, and conceptual approaches. This research specification uses a prescriptive approach. The data required for this study utilizes secondary data obtained from library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary, secondary, and tertiary legal materials will be explained qualitatively and normatively.

The results of the study indicate that the dishonorable dismissal of Notary Muhammad Irsan contains procedural defects, such as the absence of a direct examination by the Central Supervisory Board, a summons that was only carried out once, and the delay in the decision of the Minister of Law that exceeded the 30-day time limit, thus contradicting the UUJN, namely violating the serious violation of the obligation not to submit a copy of the PPJB deed and the prohibition of holding office outside the area of his office. Differences in the judge's legal considerations occurred between the PTUN which emphasized procedural justice and canceled the dismissal, with the Supreme Court in the Judicial Review which prioritized substantive justice which violated the obligation not to submit a copy of the PPJB deed and the prohibition of holding office outside the area of his office, thus assessing serious violations of the UUJN as a legitimate basis for dismissal in order to maintain the integrity of the office and protect the public.